

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Manajemen perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara masih belum maksimal dibuktikan di mana dalam pelaksanaan manajemen perparkiran ditemukan bahwa tidak semua bagian atau fungsi berjalan dengan baik.

1. Perencanaan (*Planning*)

Fungsi Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum berjalan dengan optimal. Dinas Perhubungan mempunyai rencana dan tujuan dalam bentuk rencana strategis dan rencana kerja tahunan termasuk didalamnya penetapan target retribusi pertahunnya. Dinas Perhubungan juga telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan retribusi parkir. Namun, pada pelaksanaannya, terkendala pada perbedaan antara target dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan dengan target yang dibebani oleh Pemerintah Daerah. Dinas Perhubungan juga telah melakukan evaluasi perencanaan, tetapi evaluasi yang dilakukan selama ini juga belum memperoleh hasil yang baik karena masih ditemukannya beberapa masalah.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian telah dijalankan cukup baik oleh Dinas Perhubungan dengan membentuk tim kerja perzonasi parkir disetiap titik lokasi parkir. Dinas Perhubungan juga telah membagi tugas dan wewenang kepada pihak ketiga dan juru parkir. Berkaitan dengan pembagian tugas

dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengelola perparkiran, pihak ketiga sebagai koordinator pelaksana pemungutan retribusi parkir, sedangkan juru parkir telah ditentukan oleh pihak ketiga terkait pembagian jam kerja dan pelaksanaan tugas di lapangan. Sedangkan koordinasi lintas sektor dilapangan seperti Satpol PP, kepolisian setempat atau polsek pernah dilakukan walaupun tidak setiap tahun. Namun, pihak Dinas Perhubungan memiliki keinginan untuk melakukan sinergitas dengan pihak tersebut secara berkelanjutan untuk membantu dalam mengatasi permasalahan seperti parkir liar, pungli, atau premanisme di jalan.

3. Pengumpulan Sumber Daya (*Assembling of Resources*)

Pengumpulan Sumber Daya belum dijalankan dengan maksimal oleh Dinas Perhubungan. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan dirasa belum mencukupi untuk mengelola tugas dan tanggung jawab yang ada sehingga perlu adanya penambahan SDM yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan pengawasan dan koordinasi. Sedangkan berkaitan dengan SDM lain di luar Dinas Perhubungan, yaitu pihak ketiga dan juru parkir secara kuantitas sudah dirasa cukup untuk saat ini, tetapi secara kualitas masih kurang sehingga perlu diadakan pembinaan. Meskipun, Dinas Perhubungan telah berupaya melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas juru parkir, adanya kendala dalam alokasi anggaran menyebabkan pembinaan belum dapat diterapkan secara merata. Berkaitan dengan sarana penunjang telah memadai, meskipun masih terdapat aspirasi

untuk penambahan fasilitas seperti payung atau jas hujan yang diperlukan juru parkir saat musim hujan.

4. Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dikatakan sudah cukup baik. Proses pemberian instruksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kepada pihak ketiga diberikan lewat rapat pembinaan. Sedangkan instruksi untuk juru parkir diberikan oleh pihak ketiga. Koordinasi dan komunikasi antara Dinas Perhubungan dilakukan secara vertikal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, koordinasi dan komunikasi tersebut seringkali hanya sebatas penyerahan atau penagihan setoran. Berkaitan dengan pemotivasian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebatas agar bawahan melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan, pemotivasian dalam bentuk pengharagaan dalam bentuk material dan non-material belum ada.

5. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan juga belum berjalan dengan optimal. Selama ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan lebih berorientasi pada pengawasan pencapaian target tertentu. Fokus ini seakan akan belum mencakup aspek aspek lain karena belum adanya standar pengawasan baku yang tertulis. Berkaitan dengan pengukuran kinerja indikator kinerja yang diukur dengan alat ukur finansial dan non finansial. Sanksi yang diberikan dishub berupa sanksi administratif, teguran, bahkan pemutusan hubungan kerja.

5.2 Implikasi

1. Dalam perencanaan target retribusi parkir, penting untuk menjalin koordinasi dan komunikasi yang efektif sehingga dapat mencapai kesepakatan yang realistis berdasarkan potensi dan kondisi lapangan.
2. Melakukan studi banding terkait pengelolaan parkir ke dinas perhubungan lain yang kinerja atau pencapaiannya lebih baik. Selain itu, berkaitan dengan koordinasi lintas sektor, Dishub dapat menyelenggarakan pertemuan rutin antara Satpol PP, kepolisian, dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah-masalah terkait perparkiran dan keamanan di jalan serta merumuskan solusi bersama.
3. Memperbaiki atau membenahi sumber daya manusia yang ada karena manusia merupakan objek kunci dalam pelayanan perparkiran. Apabila tim berkualitas maka keseluruhan akan berjalan lebih lancar dan teratur.
4. Membangun hubungan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan melakukan dialog terbuka dan kontinu untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan serta untuk menampung aspirasi dari pengelola, juru parkir, atau masyarakat terkait parkir. Selain itu, perlu juga untuk mempertimbangkan sistem *reward* untuk memberi motivasi sehingga kinerja menjadi lebih baik.
5. Melakukan evaluasi ulang terkait standar pengawasan agar tidak hanya terfokus pada setoran, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang dapat meningkatkan retribusi parkir.